

Implementation of the Digital Access Expansion Program in Improving Gender Equality in Sidoarjo Regency **[Implementasi Program Perluasan Akses Digital Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo]**

Saniyaah Aabidah Febriani¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *The gender-based digital divide remains a challenge in the digital transformation process in Sidoarjo Regency, where women have not yet fully gained equal access and capabilities in utilizing digital technology. This study employed a qualitative approach with descriptive methods through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The research was conducted at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (P3AKB) in Sidoarjo Regency as the implementing agency for the Gender-Based Digital Access Expansion Program. Research informants were selected purposively, including staff from the Women's Empowerment Division at the P3AKB Office, PKK cadres as field facilitators, and groups of women who benefited from the program. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model and the George Edward III policy implementation framework, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that in terms of communication, information dissemination has been carried out through coordination with villages and PKK cadres, but this has not been evenly distributed in rural areas. In terms of resources, limitations in the number and capacity of facilitators and internet infrastructure are the main obstacles. In terms of disposition, implementers demonstrated high commitment, but some participants still lacked confidence and time constraints. In terms of bureaucratic structure, work procedures are in place, but the program's sustainability depends on the annual budget. These findings indicate that program implementation is not yet optimal and requires strengthening strategies that are more sustainable and inclusive.*

Keywords - digital access, gender equality, policy implementation, digital literacy.

Abstrak. *Kesenjangan digital berbasis gender masih menjadi tantangan dalam proses transformasi digital di Kabupaten Sidoarjo, di mana perempuan belum sepenuhnya memperoleh akses dan kemampuan yang setara dalam pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana Program Perluasan Akses Digital berbasis gender. Informan penelitian dipilih secara purposive yang meliputi staf Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AKB, kader PKK sebagai fasilitator lapangan, serta kelompok perempuan penerima manfaat program. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta kerangka implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui koordinasi dengan desa dan kader PKK, namun belum merata di wilayah pedesaan. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping serta infrastruktur internet menjadi kendala utama. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, tetapi sebagian peserta masih memiliki rasa kurang percaya diri dan keterbatasan waktu. Pada aspek struktur birokrasi, prosedur kerja telah tersedia, namun keberlanjutan program bergantung pada anggaran tahunan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal dan memerlukan penguatan strategi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.*

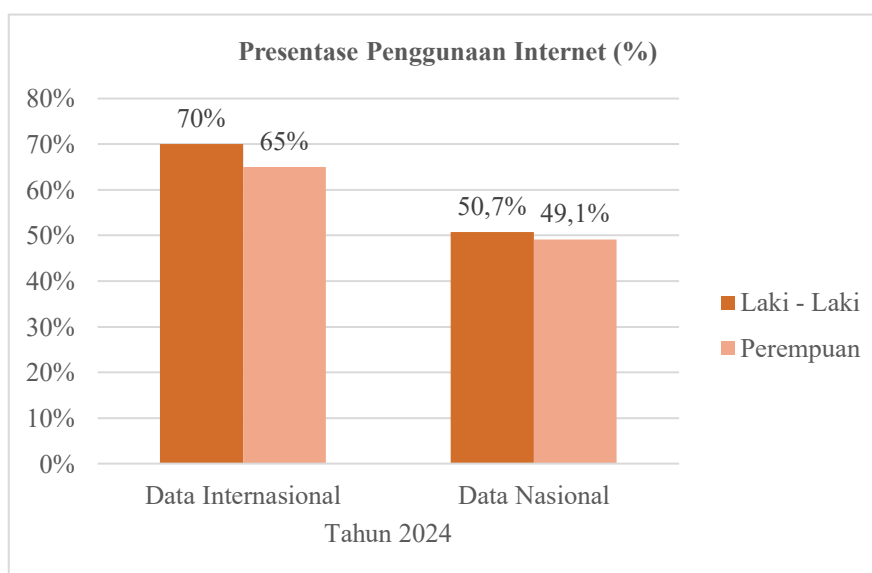
Kata Kunci - akses digital, kesetaraan gender, implementasi kebijakan, literasi digital.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia.[1] Digitalisasi tidak hanya memengaruhi bidang ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan pencapaian kesetaraan gender. Melalui pemanfaatan teknologi digital, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, informasi, layanan publik, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, manfaat

transformasi digital ini belum dirasakan secara merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kesenjangan digital berbasis gender masih menjadi tantangan nyata. Namun demikian, manfaat transformasi digital tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.[2] Dibanyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terdapat kesenjangan digital berbasis gender, yaitu perbedaan tingkat akses, kemampuan, dan partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam penggunaan teknologi informasi. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan masih kuatnya norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik maupun digital.[3]

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pemanfaatan teknologi digital melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender [4], Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan kesetaraan gender dalam pemanfaatan TIK.[5] Kebijakan-kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di bidang digital merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Transformasi digital merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional di Indonesia, karena berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet nasional mencapai 79,5%, atau sekitar 221,56 juta pengguna dari total populasi 278,7 juta jiwa. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perluasan akses digital di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama antara kelompok gender, wilayah, dan tingkat sosial ekonomi. Presentase kesetaraan gender dalam transformasi digital dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kesetaraan Gender Dalam Transformasi Digital Tahun 2024

Sumber: *International Telecommunication Union (ITU) 2024 dan Dinas P3AKB Sidoarjo 2025 (diolah)*

Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya kesenjangan gender dalam pemanfaatan teknologi digital pada tahun 2024 baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada level internasional, persentase pengguna internet laki-laki mencapai 70%, sedangkan pengguna perempuan sebesar 65%, sehingga terdapat selisih sekitar 5%. Sementara itu, pada tingkat nasional tahun 2024, persentase pengguna internet laki-laki sebesar 50,7% dan perempuan sebesar 49,1%, dengan selisih sekitar 1,6%. Meskipun kesenjangan di tingkat nasional relatif lebih kecil dibandingkan tingkat global, perbedaan tersebut tetap menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi digital berbasis gender. Kondisi ini dikenal

sebagai *gender digital divide*, yaitu ketimpangan akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan perbedaan gender.[2] Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital pada sebagian kelompok perempuan, keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah tertentu, serta faktor sosial dan budaya yang masih membatasi partisipasi perempuan di ruang digital. Data tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif. Upaya pemerataan akses dan peningkatan literasi digital berbasis gender masih diperlukan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi transformasi digital harus mempertimbangkan aspek kesetaraan gender secara komprehensif.

Fenomena kesenjangan digital berbasis gender juga terjadi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sekitar dua juta jiwa dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 94,90, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk mendorong kesetaraan gender melalui pemanfaatan teknologi digital.[6] Oleh karena itu, upaya seperti Program Perluasan Akses Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut dan mewujudkan transformasi digital yang inklusif serta berkeadilan gender. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo menjalankan Program Perluasan Akses Digital yang bertujuan memperkuat literasi digital perempuan, memperluas partisipasi mereka dalam pembangunan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis teknologi. Program tersebut juga mendukung implementasi kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dan transformasi digital yang inklusif.[7] Dengan demikian, perluasan akses digital tidak hanya menjadi sarana pemerataan teknologi, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk pemberdayaan perempuan dan percepatan kesetaraan gender di tingkat lokal maupun nasional.[8] Data terkait pengguna internet di Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pengguna Internet di Kabupaten Sidoarjo 2024

NO	Jenis Kelamin	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	80,60%
2.	Perempuan	74,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024 (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 1, tingkat akses internet di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Kelompok laki-laki memiliki tingkat akses internet sebesar 80,60%, sedangkan perempuan sebesar 74,78%. Dengan demikian terdapat selisih sebesar 5,82% antara keduanya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses internet masih sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Selisih tersebut mengindikasikan bahwa faktor kepemilikan perangkat, kondisi ekonomi, serta ketersediaan infrastruktur digital masih memengaruhi tingkat akses internet pada kelompok perempuan di wilayah tersebut. Kabupaten Sidoarjo memiliki dinamika sosial yang tidak terlepas dari kondisi tersebut. Meskipun capaian pembangunan gender di daerah menunjukkan kemajuan, kesenjangan dalam akses digital tetap menjadi perhatian. Data ini menegaskan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

Dalam konteks ini, Program Perluasan Akses Digital dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan digital yang masih dialami oleh perempuan. Program Perluasan Akses Digital yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo telah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi digital perempuan, terutama di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial. Namun,

pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta kurangnya tenaga pendamping digital yang berkompeten.

Pelaksanaan program transformasi digital di daerah masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok perempuan dan masyarakat usia produktif di wilayah semi-perkotaan dan pedesaan. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan internet, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memproduksi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan berbagai laporan survei literasi digital nasional tahun 2024, masih terdapat kelompok masyarakat yang hanya menggunakan internet untuk komunikasi dasar dan media sosial, tanpa memahami keamanan data pribadi atau pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi. Banyak pengguna belum mampu membedakan informasi valid dan hoaks, serta belum memahami etika digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat akses internet belum mencapai tingkat pemanfaatan teknologi yang optimal. Di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, akses internet perempuan mencapai 74,78%, sedangkan laki-laki mencapai 80,60%. Meskipun angka tersebut menunjukkan tingkat akses yang relatif tinggi, kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara efektif masih kurang. Mayoritas penduduk masih kesulitan menggunakan berbagai aplikasi layanan publik digital. Situasi ini berakar dari kurangnya pemanfaatan program pemberdayaan berbasis teknologi yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena itu, peningkatan literasi digital merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendorong transformasi digital yang lebih inklusif dan transparan.

Selain persoalan literasi, keterbatasan infrastruktur internet juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program digitalisasi. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jaringan internet yang stabil, ketersediaan sinyal di wilayah pinggiran, serta akses terhadap perangkat digital seperti komputer dan smartphone. Meskipun wilayah perkotaan relatif memiliki jaringan yang memadai, beberapa desa penyangga masih mengalami kualitas sinyal yang tidak stabil. Kecepatan internet yang rendah menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses layanan daring secara optimal. Selain itu, tidak semua rumah tangga memiliki perangkat yang mendukung pembelajaran atau pelatihan digital. Biaya paket data juga menjadi pertimbangan ekonomi bagi sebagian keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesenjangan digital tidak hanya terjadi karena faktor kemampuan, tetapi juga karena keterbatasan fasilitas fisik. Ketika infrastruktur belum merata, maka peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam ekosistem digital menjadi terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas program pemberdayaan berbasis teknologi. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur menjadi prasyarat penting dalam mendukung kebijakan digital yang inklusif.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga pendamping digital yang kompeten di tingkat daerah. Tenaga pendamping digital berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Namun, jumlah pendamping yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa program pelatihan, satu pendamping harus menangani puluhan peserta sekaligus sehingga proses pembelajaran kurang maksimal. Selain kuantitas yang terbatas, kualitas kompetensi pendamping juga masih perlu ditingkatkan. Tidak semua pendamping memiliki kemampuan pedagogis dan teknis yang memadai untuk menjelaskan materi literasi digital secara aplikatif. Minimnya pelatihan lanjutan bagi pendamping menyebabkan materi yang disampaikan kurang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan program setelah pelatihan selesai. Masyarakat sering kali tidak memiliki tempat konsultasi lanjutan ketika menghadapi kendala teknis. Akibatnya, transformasi digital berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan jumlah pendamping digital menjadi kebutuhan mendesak.

Meskipun demikian, P3AKB terus berupaya memperluas jangkauan program melalui kerja sama dengan pemerintah desa, komunitas perempuan, dan lembaga pelatihan guna mewujudkan kesetaraan gender dalam transformasi digital daerah. Melalui program ini, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.[9] Oleh karena itu, pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dalam konteks implementasi kebijakan, George Edward III (1980), seorang teoritikus kebijakan publik, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang sangat

penting. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirancang, jika implementasinya tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Edward III menyatakan bahwa ada empat variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.[10]

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Faila, Sufa Marhamah, dkk. (2024) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kesetaraan Gender dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Laporan) bagi Digital Society di Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kesetaraan gender di tingkat lokal belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya masyarakat, serta peran pemerintah yang masih rendah dalam isu gender.[11] Selanjutnya, Muchsinin, Sjaferi, dan Yulianti (2025) dalam jurnal berjudul “Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang” dan menemukan bahwa pelayanan publik digital belum sepenuhnya informatif akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran.[12] Sementara itu, Ashya Ravika, Salma Aulia, dkk. (2024) melalui penelitian berjudul “Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima di Indonesia” dalam Parahyangan Economic Development Review menemukan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun semakin tinggi tingkat ekonomi justru diikuti dengan menurunnya kesetaraan gender di beberapa daerah.[13] Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Nur Danisa Rahmadani dan Isna Fitria Agustina (2024) dalam jurnal berjudul “Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa di Indonesia” menunjukkan bahwa pembangunan berbasis gender masih belum berjalan secara efektif karena kelemahan dalam komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum responsif terhadap gender.[14] Dari empat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan digital dan kesetaraan gender memiliki tantangan yang serupa, yakni keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta dukungan kelembagaan yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menganalisis implementasi Program Perluasan Akses Digital dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo, di mana keberhasilan program serupa juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan pemerintah daerah, serta kesadaran digital masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serupa dengan penelitian terdahulu, namun memiliki fokus yang lebih mendalam pada implementasi Program Perluasan Akses Digital di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian dibandingkan beberapa studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif tanpa verifikasi lapangan yang kuat.[15] Kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada penyajian data empiris terkini yang menggambarkan kondisi literasi digital dan partisipasi perempuan di Kabupaten Sidoarjo, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik terhadap upaya pemberdayaan perempuan melalui implementasi Program Perluasan Akses Digital oleh Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasinya. Salah satu kendala utama dalam perluasan akses digital bagi perempuan adalah rendahnya literasi digital, terutama di wilayah perdesaan. Banyak peserta masih kesulitan memahami penggunaan perangkat dan aplikasi digital dasar. Keterbatasan infrastruktur TIK, seperti akses internet yang belum merata dan sarana pendukung yang minim, juga menghambat efektivitas program. Selain itu, kurangnya SDM pendamping yang kompeten di bidang teknologi digital membuat proses pelatihan belum optimal. Dari sisi sosial budaya, pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada peran domestik turut membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan digitalisasi. Di samping itu, keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan tambahan. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perluasan akses digital tidak hanya bergantung pada fasilitas teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM, dukungan sosial, dan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan responsif gender.[16] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program perluasan akses digital yang

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi program perluasan akses digital yang responsif gender di Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan serta menginterpretasikan makna di balik data yang diperoleh. Data dikumpulkan menggunakan metode triangulasi, dan dianalisis secara induktif. [17] Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, karena instansi ini menjadi pelaksana utama program perluasan akses digital berbasis gender. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan daerah prioritas transformasi digital nasional, sehingga relevan untuk mengkaji implementasinya dalam mewujudkan kesetaraan gender. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini meliputi Ibu Fenny, selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, kader atau fasilitator lapangan (kader pemberdayaan perempuan dan kader PKK), serta perwakilan kelompok perempuan penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan program, serta data statistik terkait kesetaraan gender dan literasi digital. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles and Huberman, yang meliputi: (a) Pengumpulan Data, di mana data yang diperoleh belum dianalisis secara langsung, (b) Reduksi Data, tahap ini berfungsi untuk mengarahkan, mengelompokkan, menyaring, dan mengorganisir data yang relevan, (c) Penyajian Data, menyusun informasi secara sistematis untuk membantu dalam menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan, (d) Penarikan Kesimpulan, tahap akhir dalam analisis data untuk membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat dari proses pengumpulan data. [18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program Perluasan Akses Digital di Kabupaten Sidoarjo merupakan inisiatif strategis untuk mendorong kesetaraan gender melalui peningkatan literasi dan partisipasi digital di kalangan perempuan. Implementasi ini dianalisis menggunakan kerangka George Edward III, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai penentu efektivitas program.

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan tujuan Program Perluasan Akses Digital dapat dipahami dan dijalankan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran, khususnya perempuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta pendampingan bersama kader PKK dan pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan komunikasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran, terutama perempuan yang berada di wilayah pedesaan.



Gambar 2. Foto dengan Bu Fenny selaku Staf Dinas P3AKB Sidoarjo

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Sebagai data sekunder, terdapat dokumentasi berupa foto yang memperlihatkan diskusi antara penulis dan Ibu Fenny selaku staf Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo. Dalam foto tersebut terlihat proses dialog yang berlangsung secara langsung dan interaktif terkait pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital. Diskusi tersebut membahas mekanisme sosialisasi, strategi pendampingan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Ibu Fenny memberikan penjelasan mengenai bentuk koordinasi yang telah dilakukan bersama kader PKK dan pemerintah desa. Sementara itu, penulis menggali informasi terkait efektivitas komunikasi program kepada kelompok perempuan di wilayah pedesaan. Dokumentasi ini menunjukkan adanya proses klarifikasi dan pendalaman data secara langsung dari pihak pelaksana program. Interaksi tersebut juga mencerminkan keterbukaan informasi dari instansi terkait dalam mendukung kebutuhan penelitian. Foto diskusi menjadi bukti bahwa data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari dokumen, tetapi juga hasil komunikasi langsung dengan pelaksana kebijakan. Dengan adanya dokumentasi tersebut, validitas informasi mengenai pelaksanaan program semakin kuat. Hal ini mempertegas bahwa aspek komunikasi telah diupayakan, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan jangkauan kepada seluruh kelompok sasaran.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bu Fenny selaku Staf Dinas P3AKB yang menyampaikan bahwa:

“Informasi program biasanya disampaikan melalui sosialisasi di balai desa dan melalui kader PKK. Di wilayah perkotaan, penyampaian informasi berlangsung lebih lancar karena sebagian besar masyarakat telah memiliki perangkat komunikasi dan akses internet yang memadai. Namun, di wilayah pedesaan masih banyak ibu-ibu yang belum memiliki telepon genggam pribadi atau mengalami keterbatasan jaringan internet, sehingga informasi program sering kali tidak diterima secara menyeluruh atau mengalami keterlambatan.”

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Kader PKK yang menyampaikan bahwa:

“Kalau hanya mengandalkan pesan di grup WhatsApp, tidak semua ibu-ibu langsung merespons. Ada yang meminjam ponsel suami, ada yang baru membaca pesan beberapa hari kemudian. Biasanya kami harus menyampaikan ulang secara langsung saat pertemuan rutin supaya mereka benar-benar paham.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa mekanisme penyampaian informasi Program Perluasan Akses Digital telah dilakukan melalui pola komunikasi yang dirancang, seperti grup WhatsApp, koordinasi dengan kader, serta pertemuan rutin di desa, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kesiapan teknologi masyarakat pedesaan. Ketimpangan kepemilikan perangkat digital dan keterbatasan kualitas jaringan internet menyebabkan informasi tidak diterima secara merata oleh seluruh sasaran, khususnya perempuan. Sebagian warga tidak memiliki ponsel pintar pribadi atau masih berbagi perangkat dengan anggota keluarga, sementara kualitas sinyal yang tidak stabil membuat pesan sering terlambat diterima. Menurut Kader Desa, penyampaian informasi melalui WhatsApp kurang efektif karena tidak semua warga memiliki akses internet yang andal. Akibatnya, informasi mengenai jadwal dan kegiatan program sering terlambat diketahui dan harus dijelaskan kembali melalui pertemuan langsung seperti kegiatan PKK. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi sebagian perempuan karena informasi yang diterima tidak lengkap atau tidak tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang menggabungkan media digital dan pendekatan tatap muka agar penyampaian informasi lebih merata dan efektif.

Tabel 2. Hasil Komunikasi Program Perluasan Akses Digital

Aspek Komunikasi	Hasil Penelitian
Penyampaian Informasi	Informasi program disampaikan melalui sosialisasi langsung dan peran kader PKK di tingkat desa.
Kejelasan Pesan	Tujuan program dipahami secara umum, namun penjelasan teknis masih terbatas.
Konsistensi Informasi	Informasi yang diterima peserta relatif sama, meskipun kedalaman pemahaman berbeda.
Jangkauan Informasi	Penyampaian informasi lebih efektif di wilayah yang mudah dijangkau aparat desa.
Respons Peserta	Sebagian perempuan menunjukkan minat mengikuti kegiatan, sementara lainnya masih pasif.

Sumber: Dikelola penulis dari Hasil Wawancara dengan Bu Fenny selaku Staf Dinas P3AKB, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi Program Perluasan Akses Digital telah dilaksanakan melalui sosialisasi langsung dan dukungan kader PKK di tingkat desa. Informasi program pada dasarnya telah diterima oleh perempuan sasaran, namun pemahaman yang diperoleh masih bersifat umum karena penjelasan teknis belum disampaikan secara mendalam. Selain itu, meskipun informasi yang disampaikan relatif sama, tingkat pemahaman peserta menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh jangkauan aparat desa dan kondisi wilayah. Respons peserta juga beragam, di mana sebagian perempuan menunjukkan minat untuk terlibat dalam kegiatan, sementara sebagian lainnya menunjukkan tingkat keterlibatan yang masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif dan merata.

Menurut George Edward III, komunikasi berperan dalam memastikan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana dan sasaran program. Komunikasi yang kurang efektif berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat. menunjukkan bahwa komunikasi Program Perluasan Akses Digital di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan melalui sosialisasi di tingkat desa serta peran kader PKK. Informasi program umumnya telah diterima oleh perempuan sasaran, namun penyampaiannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan tingkat literasi digital peserta. Selain itu, pemerataan informasi masih menghadapi kendala karena perempuan di wilayah perdesaan lebih bergantung pada komunikasi tatap muka dibandingkan akses informasi digital. Temuan ini selaras dengan penelitian Faila, Sufa Marhamah, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi program kesetaraan gender berbasis teknologi masih perlu diperkuat akibat komunikasi kebijakan yang kurang merata dan belum kontekstual dengan kondisi sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih perlu diperkuat agar tujuan Program Perluasan Akses Digital dapat tercapai secara lebih menyeluruh. [19].

2. Sumber Daya

Sumber daya berperan penting dalam menunjang pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana digital, kualitas jaringan internet, serta dukungan anggaran. Dalam pelaksanaannya, program ini telah dilaksanakan secara rutin, namun ketersediaan sumber daya yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan peserta secara menyeluruh.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, jumlah fasilitator atau pendamping digital yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, terutama ketika satu sesi dihadiri lebih dari dua puluh orang sementara pendamping hanya satu atau dua orang. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan praktik tidak dapat dilakukan secara individual dan intensif, khususnya bagi peserta yang masih berada pada tahap dasar penggunaan teknologi. Dari sisi kualitas, meskipun pendamping telah memahami materi dasar literasi digital, tidak

semua memiliki kompetensi pedagogis yang kuat untuk menghadapi peserta dengan tingkat kemampuan yang sangat beragam. Beberapa peserta membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih sederhana, bertahap, dan berulang, sehingga memerlukan keterampilan komunikasi dan metode pengajaran yang adaptif. Selain itu, keterbatasan pelatihan lanjutan bagi pendamping juga memengaruhi kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan aplikasi dan layanan digital yang terus berubah. Minimnya tenaga teknis khusus yang menangani gangguan jaringan atau perangkat juga menjadi kendala tambahan saat pelatihan berlangsung. Akibatnya, ketika terjadi kendala teknis, proses belajar sering terhenti dan harus menunggu penanganan. Dengan demikian, ketidakcukupan SDM tidak hanya terletak pada jumlah yang terbatas, tetapi juga pada kebutuhan peningkatan kapasitas dan spesialisasi kompetensi pendamping. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bu Fenny selaku staf Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan bahwa:

“Pelatihan digital dilaksanakan secara rutin dengan materi dasar, seperti pengenalan dan penggunaan ponsel, pemanfaatan aplikasi digital, serta pemahaman awal tentang layanan berbasis daring. Peserta kegiatan menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, namun tingkat kemampuan digital mereka masih beragam. Sebagian peserta masih berada pada tahap sangat awal sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Di sisi lain, jumlah fasilitator yang tersedia serta dukungan anggaran yang ada masih terbatas, sehingga proses pendampingan belum dapat dilakukan secara merata kepada seluruh peserta. Dalam satu sesi pelatihan, peserta bisa lebih dari dua puluh orang, sementara pendamping hanya satu atau dua orang. Kalau praktik langsung, kami harus bergantian membantu. Apalagi kalau jaringan internet sedang tidak stabil, proses belajar jadi lebih lama dan materi harus diulang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital sebenarnya telah berjalan secara rutin dengan materi dasar yang terstruktur, seperti pengenalan penggunaan ponsel, pemanfaatan aplikasi digital, serta pemahaman layanan berbasis daring. Antusiasme peserta tergolong cukup tinggi, yang menunjukkan adanya kebutuhan dan minat terhadap peningkatan kapasitas digital. Namun demikian, tingkat kemampuan digital peserta masih sangat beragam, bahkan sebagian masih berada pada tahap sangat awal sehingga memerlukan pendampingan intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah peserta, variasi tingkat kemampuan, dan ketersediaan fasilitator. Dalam satu sesi pelatihan yang dapat diikuti lebih dari dua puluh peserta, jumlah pendamping hanya satu atau dua orang sehingga proses praktik harus dilakukan secara bergantian. Situasi tersebut menyebabkan pendampingan tidak dapat diberikan secara optimal kepada setiap peserta, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Keterbatasan jumlah fasilitator dan dukungan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi perluasan layanan pendampingan. Selain itu, ketika jaringan internet tidak stabil, proses pembelajaran menjadi lebih lambat dan materi sering kali harus diulang kembali. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga baik bagi peserta maupun pendamping. Oleh karena itu, program ini memerlukan penguatan kapasitas fasilitator, dukungan infrastruktur, serta pendampingan jangka panjang agar tujuan peningkatan akses dan kemampuan digital dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.



Gambar 3. Ketersediaan Sarana Digital dalam Kegiatan Pelatihan Perempuan

Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan fasilitator dan sarana yang tersedia. Namun, ketersediaan fasilitas dan jumlah pendamping menunjukkan perlunya penguatan sumber daya agar pelaksanaan program lebih efektif.

Menurut George Edward III, sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan sulit dijalankan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital telah didukung oleh fasilitator dan kader lapangan. Namun, keterbatasan jumlah pendamping, sarana pelatihan, serta kualitas jaringan internet di beberapa wilayah menyebabkan proses pendampingan belum berjalan secara intensif dan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber daya dalam Program Perluasan Akses Digital sudah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan. Jumlah pendamping masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan peserta, sehingga pendampingan belum berlangsung secara intensif. Fasilitas pelatihan telah tersedia, tetapi kualitas jaringan internet di beberapa wilayah masih menjadi kendala. Selain itu, meskipun anggaran telah dialokasikan secara rutin, dukungannya masih perlu diperkuat agar jangkauan dan kualitas pelaksanaan program dapat meningkat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Muchsinin, Sjafari, dan Yulianti (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan sumber daya menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas program [20].

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dan sasaran program memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Program Perluasan Akses Digital. menunjukkan bahwa pelaksana program, seperti Dinas P3AKB, kader PKK, dan fasilitator lapangan, memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Namun, pada tingkat sasaran program, sikap dan motivasi peserta masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Disposisi menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan dan penerimaan dari pelaksana maupun peserta. Salah satu informan dari pelaksanaan yaitu Bu Rini yang merupakan Kader PKK, menyatakan bahwa:

"Saya selalu berusaha meyakinkan orang bahwa belajar secara digital tidaklah seburuk itu. Karena awalnya mereka ragu dan takut salah, kami dampingi pelan-pelan mereka hingga menjadi lebih percaya diri. Perempuan yang telah memiliki usaha umumnya menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk mengikuti pelatihan digital karena mereka merasakan adanya kebutuhan langsung terhadap pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Pelatihan dipandang sebagai sarana yang dapat membantu meningkatkan kemampuan serta memperluas peluang yang dimiliki. Namun, di sisi lain masih terdapat sebagian perempuan yang belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pelatihan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perasaan kurang mampu dalam menggunakan teknologi, keterbatasan waktu akibat tanggung jawab, serta adanya pandangan sosial bahwa teknologi digital belum dipandang sebagai kebutuhan utama bagi perempuan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa disposisi dan sasaran program memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Program Perluasan Akses Digital. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksana program seperti Dinas P3AKB, kader PKK, dan fasilitator lapangan memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendampingan berkelanjutan. Para fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berupaya membangun rasa percaya diri peserta agar lebih siap menerima perubahan teknologi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan suportif menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan psikologis peserta. Namun demikian, pada tingkat sasaran program, sikap dan motivasi peserta masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Ketua PKK Kecamatan menjelaskan bahwa perempuan yang telah memiliki usaha cenderung memiliki motivasi lebih tinggi karena merasakan kebutuhan langsung terhadap pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sebaliknya, sebagian perempuan lainnya masih belum terlibat aktif karena merasa kurang mampu menggunakan teknologi, memiliki keterbatasan waktu akibat tanggung

jawab domestik, serta adanya pandangan sosial bahwa teknologi digital belum menjadi kebutuhan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program secara umum memberikan hasil positif, masih terdapat permasalahan internal dan sosial yang memengaruhi partisipasi. Rendahnya rasa percaya diri dan persepsi negatif terhadap teknologi menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada komitmen pelaksana dalam membangun motivasi serta perubahan pola pikir peserta.



Gambar 4. Sikap dan Partisipasi Perempuan dalam Mengikuti Pelatihan Literasi Digital

Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Gambar 4 memperlihatkan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pelatihan Program Perluasan Akses Digital. Dari kegiatan tersebut terlihat adanya perbedaan tingkat partisipasi dan respons peserta selama proses pelaksanaan program. Sebagian peserta tampak aktif mengikuti materi dan berinteraksi dengan fasilitator, sementara sebagian lainnya menunjukkan keterlibatan yang lebih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesiapan individu, tingkat kepercayaan diri, serta pengalaman sebelumnya dalam pemanfaatan teknologi digital turut memengaruhi partisipasi perempuan dalam program.

Menurut George Edward III, Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana serta sasaran kebijakan dalam menjalankan suatu program. Disposisi yang positif dapat memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan disposisi yang belum sejalan sepenuhnya masih menjadi tantangan dalam mencapai tujuan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana Program Perluasan Akses Digital memiliki komitmen yang cukup baik dalam mendorong partisipasi perempuan. Namun, pada tingkat sasaran, disposisi perempuan masih menunjukkan perbedaan. Sebagian perempuan menampilkan minat dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan, sementara sebagian lainnya masih mempertimbangkan keterlibatan mereka karena keterbatasan waktu, tingkat kepercayaan diri, serta tanggung jawab dalam rumah tangga yang dijalani. serta pemberian motivasi berkelanjutan dan penyesuaian jadwal pelatihan dengan waktu luang peserta, merupakan contoh pendekatan yang lebih inklusif untuk upaya penguatan disposisi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ashya Ravika, Salma Aulia, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa norma sosial dan pembentukan peran gender masih menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan perempuan dalam berpartisipasi pada program transformasi digital [21].

4. Struktur Birokrasi

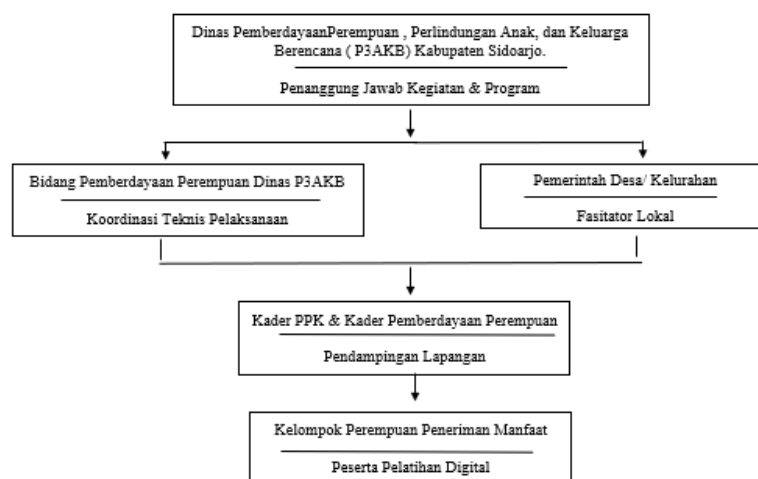
Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital mencakup kejelasan SOP, pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta dukungan kelembagaan dan anggaran. Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah memiliki struktur pelaksanaan yang cukup jelas, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa, kader PKK, dan pihak pendukung lainnya dalam menjalankan program tersebut. Untuk memastikan program dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, para peneliti meneliti bagaimana mekanisme tugas, koordinasi, dan kerja dikembangkan. Hasil wawancara dengan Bu Dewi selaku Pemerintah Desa menunjukkan bahwa:

“Biasanya kami mengumpulkan peserta, kita harus berkoordinasi dengan kader PKK setelah menerima instruksi dari Dinas P3AKB mengenai jadwal dan teknis kegiatan. Pembagian tugas sudah ada, tetapi karena distrik juga mengelola program lain, pelaksanaannya terkadang harus diselaraskan dengan agenda yang sudah ada”.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bu Itri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang menyampaikan bahwa:

“Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital telah memiliki mekanisme dan prosedur kerja yang jelas serta didukung oleh koordinasi antara Dinas P3AKB, pemerintah desa, dan kader PKK. Namun, keberlanjutan program masih bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan dan pembagian tugas pegawai dengan program lain, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital pada dasarnya telah memiliki kerangka kerja yang cukup jelas, meliputi kejelasan SOP, pembagian tugas, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta dukungan kelembagaan dan anggaran. Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah membangun pola koordinasi dengan pemerintah desa, kader PKK, dan pihak pendukung lainnya agar program berjalan secara terstruktur. Hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa mekanisme teknis biasanya diawali dengan instruksi dari Dinas P3AKB terkait jadwal dan pelaksanaan kegiatan, kemudian desa berkoordinasi dengan kader PKK untuk mengumpulkan peserta. Pembagian tugas secara administratif sebenarnya sudah ditetapkan, namun dalam praktiknya sering kali harus disesuaikan dengan agenda program lain yang juga dikelola oleh desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur kerja telah tersedia, implementasinya masih dipengaruhi oleh beban kerja lintas program. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang menyampaikan bahwa struktur birokrasi dan prosedur pelaksanaan sudah jelas serta didukung koordinasi antarlevel, tetapi keberlanjutan program masih bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan dan pembagian tugas aparatur dengan program lain. Ketergantungan pada alokasi anggaran setiap tahun menyebabkan program belum sepenuhnya berjalan konsisten dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparatur membuat fokus pelaksanaan sering terbagi dengan kegiatan lain yang bersifat prioritas. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun mekanisme koordinasi dan pendelegasian telah dikembangkan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan administratif dan struktural.



Gambar 5. Struktur Pelaksana Program Perluasan Akses Digital

Sumber: Dikelola Penulis, 2025

Gambar 5 Program Struktur Birokrasi Perluasan Akses Digital menunjukkan hierarki yang jelas, mulai dari Dinas P3AKB sebagai penanggung jawab kebijakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator teknis,

pemerintah desa sebagai fasilitator lokal, kader PKK sebagai pendamping lapangan, hingga kelompok perempuan sebagai penerima manfaat. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, keberlanjutan pelaksanaan masih dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kapasitas aparatur di setiap level.



Gambar 6. Koordinasi Pelaksana Program Perluasan Akses Digital
Sumber: Dinas P3AKB Sidoarjo, 2025

Gambar 6 kegiatan koordinasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program telah terbentuk. Namun, masih diperlukan penguatan koordinasi dan mekanisme kerja agar program dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Menurut George Edward III, Struktur Birokrasi mencakup pembagian peran, tata pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme koordinasi antar pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang tersusun dengan baik akan memudahkan pelaksanaan kebijakan dan mendukung keberlangsungan program dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo telah memiliki pembagian peran yang cukup jelas dalam pelaksanaan Program Perluasan Akses Digital. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kader PKK telah berjalan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan gaya kerja Program Perluasan Akses Digital sudah jelas, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal integrasi program dan keberlanjutan dalam studi panjang. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui implementasi program sebagai prioritas daerah, kerja aparat yang lebih terfokus, dan penyediaan anggaran yang lebih komprehensif [22]. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani dan Isna Fitria Agustina (2024) yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan kejelasan struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan berbasis gender.

VII. SIMPULAN

Implementasi Program Perluasan Akses Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kerangka George Edward III, Proses Komunikasi, penyampaian informasi program telah dilakukan melalui sosialisasi dan peran kader PKK, namun belum menjangkau seluruh perempuan secara merata, terutama di wilayah perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan kepemilikan perangkat digital dan akses jaringan internet. Dari Sumber daya, dalam penyelenggaraan program telah didukung oleh fasilitator, sarana pelatihan, dan alokasi anggaran, tetapi jumlah pendamping yang terbatas, infrastruktur digital yang belum merata, serta perbedaan tingkat literasi digital peserta menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dalam disposisi, aparatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam program menunjukkan komitmen dan sikap yang cukup positif dalam mendorong pemberdayaan perempuan, namun pada tingkat sasaran masih terdapat perbedaan motivasi dan partisipasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rasa kurang percaya diri, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik. Sementara itu dari sisi Struktur birokrasi, dan kelembagaan program telah didukung oleh pembagian tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antara Dinas P3AKB, pemerintah desa, dan kader PKK, namun keberlanjutan program masih bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan dan kapasitas aparatur, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo atas bantuan, dukungan, serta keterbukaan dalam memberikan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, kader pemberdayaan perempuan, kader PKK, serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan data serta masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] Indriati Amirullah, “Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Administrasi Publik,” *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4, Pp. 383–391, Dec. 2023, Doi: 10.47861/Sammajiva.V1i4.905.
- [2] K. V. Nayak And S. Alam, “The Digital Divide, Gender And Education: Challenges For Tribal Youth In Rural Jharkhand During Covid-19,” *Decision*, Vol. 49, No. 2, Pp. 223–237, Jun. 2022, Doi: 10.1007/S40622-022-00315-Y.
- [3] B. Kebijakan Fiskal *Et Al.*, “Kajian Pengarusutamaan Gender Analisis Ketimpangan Gender Spasial Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah.” [Online]. Available: <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- [4] “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.”
- [5] W. Adila, F. Hadi, And S. Lancang Kuning, “Kajian Literatur Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia : Evaluasi Dan Perspektif Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 318, No. 2, 2025, Doi: 10.5281/Zenodo.14913530.
- [6] N. D. Rahmadani And I. F. Agustina, “Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa Di Indonesia,” *Indonesian Culture And Religion Issues*, Vol. 1, No. 1, P. 20, Jun. 2024, Doi: 10.47134/Diksima.V1i1.34.
- [7] S. Sujarwo, T. Trisanti, And E. Kusumawardani, “Digital Literacy Model To Empower Women Using Community-Based Education Approach,” *World Journal On Educational Technology: Current Issues*, Vol. 14, No. 1, Pp. 175–188, Jan. 2022, Doi: 10.18844/Wjet.V14i1.6714.
- [8] W. Dahyoko *Et Al.*, “Kesetaraan Gender Di Era Globalisasi Pada Peran Perempuan Dalam Menghadapi Era Digital,” Vol. 3, 2024, Doi: 10.61291/Joinmr.V3.
- [9] W. Hermawati, *Kesetaraan Gender Dalam Pelaku Iptek, Mungkinkah?* [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/348047549>
- [10] A. Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, Pp. 17929–17938.
- [11] F. S. Marhamah, M. Febrianza, Marleni, And Putriyanti, “Implementasi Kesetaraan Gender Dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Laporan) Bagi Digital Society Di Ruang Lingkup Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi Iii, Kelurahan Pangkalan Balai,” *Kawanad : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1–13, Mar. 2024, Doi: 10.56347/Kjpkm.V3i1.137.
- [12] M. Muchsinin, A. Sjafari, Dan R. Yulianti, “Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang,” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, Pp. 52–63, 2025.
- [13] A. Ravika, M. Rhani, P. K. Jurusan, I. Ekonomi, A. S. Aulia, And J. F. Komala, “Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Implementasi Sdgs Kelima Di Indonesia,” 2024.
- [14] N. D. Rahmadani and I. F. Agustina, “Pengembangan Berbasis Gender : Mengubah Dinamika Desa di Indonesia,” no. 1, pp. 1–20, 2024.
- [15] W. Vera Nurhajriani *Et Al.*, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 17, Pp. 826–833, 2024, Doi: 10.5281/Zenodo.13929272.
- [16] A. Asy’hary, J. Arsyad, L. Sulisty, W. Rahayu, And E. Fatmawati, “Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer Di Desa Terpencil,” *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 1, Pp. 654–661, 2023.
- [17] F. Rita Fiantika, M. Wasil, And S. Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. [Online]. Available: www.globeleksekitifteknologi.co.id
- [18] M. Jannah And I. Rodiyah, “Implementation Of The Family Hope Program (Pkh) In Gemurung Village, Sidoarjo Regency [Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Gemurung Kabupaten Sidoarjo].”

- [19] M. Larasati, H. Rozan, I. D. Saputra, A. F. Bustanul H, A. Munir, and D. O. Radianto, “PEGEMI (Peran Generasi Milenial) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pendekatan Media Sosial,” *VISA: Journal of Visions and Ideas*, vol. 3, no. 3, pp. 505–517, 2023.
- [20] I. D. Rimbawan, M. Sanallah, A. Ardiwansa, and K. Kurniati, “Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Implikasi Wanita Karir di Era Digital,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 1, pp. 34–42, 2024.
- [21] R. A. Silalahi, W. Dermawan, and M. L. Devi, “Inovasi dan Kesetaraan: Pos sebagai Media Pemberdayaan Perempuan dalam Era Digital,” *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, vol. 7, no. 1, pp. 21–38, 2025.
- [22] A. Suryaningsih and A. H. Sanjaya, “Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 11–16, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.